

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berangkat dari hasil pembahasan dan analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ketidakpatuhan Tiongkok terhadap perjanjian *Non-Proliferation Treaty* (NPT) pada tahun 2019–2023 merupakan fenomena yang kompleks. Berdasarkan konsep rumusan Chayes & Chayes pada faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan, Tiongkok berpotensi melemahkan legitimasi NPT sebagai rezim global dan membuka ruang bagi negara lain untuk menjustifikasi perilaku serupa. Analisis pada tiap indikator faktor penyebab ketidakpatuhan oleh Chayes & Chayes dapat dijabarkan:

1. Pada indikator ambiguitas analisis menunjukkan bahwa ketidakjelasan norma dan interpretasi dalam teks perjanjian NPT memberikan ruang bagi Tiongkok untuk memanfaatkan celah hukum dan diplomatik dalam pelaksanaan kewajiban internasional nya. Beberapa pasal perjanjian memiliki redaksi yang tidak spesifik dan terbuka terhadap berbagai interpretasi yang membuka ruang ambiguitas yang dimanfaatkan oleh Tiongkok untuk menghindari kepatuhan substantif. Ketidakjelasan definisi mengenai “perlucutan senjata nuklir” dan “transparansi pelaporan” memungkinkan Tiongkok untuk mengklaim kepatuhan secara formal, meskipun secara substantif menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan semangat perjanjian. Ambiguitas juga muncul karena norma yang tidak spesifik, ketidaksesuaian antara teks hukum dan praktik implementasi, serta interpretasi antar negara yang berbeda karena latar belakang politik

dan hukum. Dalam konteks ini, ketidakpatuhan Tiongkok bukan semata-mata pelanggaran eksplisit, melainkan hasil dari manipulasi ruang interpretatif yang ada dalam perjanjian internasional.

2. Indikator faktor keterbatasan kapasitas negara menyoroti bahwa ketidakpatuhan Tiongkok terhadap NPT dipengaruhi oleh kelemahan institusional dari organisasi internasional yang bertugas mengawasi pelaksanaan perjanjian, khususnya IAEA. Ketidakpatuhan norma internasional juga tidak selalu bersumber dari penolakan eksplisit, melainkan terjadi karena prioritas politik domestik yang tidak sejalan dengan kewajiban internasional. Tiongkok menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban verifikasi, transparansi, dan perlucutan senjata sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan strategi keamanan nasional.
3. Indikator dimensi temporal menunjukkan bahwa ketidakpatuhan Tiongkok terhadap NPT bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh perubahan konteks politik dan keamanan global dari waktu ke waktu. Dalam konteks Tiongkok, perubahan temporal selama lima tahun terakhir mencakup peningkatan ketegangan geopolitik, transformasi strategi pertahanan nasional, serta penyesuaian terhadap tekanan internasional yang semakin kompleks. Selama tahun 2019–2023, peningkatan ketegangan strategis dengan Amerika Serikat, modernisasi militer, dan perubahan doktrin pertahanan nuklir Tiongkok menjadi faktor utama yang mendorong pergeseran perilaku dari kepatuhan formal menuju ketidakpatuhan substantif. Pandemi COVID-19 yang melanda Tiongkok sejak awal 2020 memaksa pemerintah Tiongkok untuk mengalihkan fokus dan sumber daya ke sektor kesehatan, stabilitas

sosial, dan pemulihan ekonomi. Kondisi ini yang menunjukkan bahwa meskipun komitmen terhadap NPT tetap ada secara formal, pelaksanaannya menjadi terbatas karena tekanan sosial-ekonomi domestik.

Berangkat dari keseluruhan analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Tiongkok sebagai negara sebenarnya memiliki kapasitas dan peluang untuk patuh terhadap perjanjian NPT, baik secara formal maupun substantif. Namun, kepatuhan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor interpretatif (*ambiguity*), kelemahan institusional (*limitations of capacity*), dan dinamika waktu (*temporal dimension*) yang membentuk perilaku strategis negara dalam rezim internasional.

Ketidakjelasan norma dalam NPT memberi ruang bagi Tiongkok untuk menafsirkan kewajiban sesuai kepentingan nasionalnya, sementara keterbatasan kapasitas lembaga internasional seperti IAEA memperlemah mekanisme verifikasi dan akuntabilitas. Di sisi lain, perubahan konteks geopolitik dan keamanan selama periode 2019–2023 menunjukkan bahwa kepatuhan bukanlah kondisi tetap, melainkan proses yang fluktuatif dan responsif terhadap tekanan eksternal. Dengan demikian, ketidakpatuhan Tiongkok terhadap NPT sesuai rumusan faktor penyebab ketidakpatuhan negara oleh Chayes & Chayes yang terhambat ataupun belum seutuhnya patuh dalam mematuhi NPT secara efektif.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan ini tentang ketidakpatuhan Tiongkok terhadap *Non-Proliferation Treaty* (NPT) tahun 2019–2023, diperlukan penguatan mekanisme verifikasi dan transparansi termasuk peningkatan kapasitas teknis dan diplomatik dalam menghadapi negara besar yang

menunjukkan indikasi ketidakpatuhan. Dalam penelitian selanjutnya disarankan untuk melanjutkan kajian mengenai kepatuhan negara terhadap NPT dengan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk analisis terhadap faktor domestik seperti dinamika elite politik, tekanan keamanan internal, dan perubahan doktrin militer. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan metode kualitatif seperti wawancara elite, analisis wacana kebijakan, atau studi komparatif antar negara pemilik senjata nuklir untuk memperkaya pemahaman terhadap dinamika kepatuhan dalam rezim non-proliferasi.

